

**ANALISIS PERUBAHAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI PUTUSAN MK No. 104/PUU-XXIII/2025)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH:

NUR AZIZAH
NIM: 2213030128

**HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2026M/1448H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)**" yang disusun oleh Nur Azizah NIM. 2213030128. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

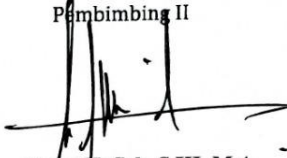
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Taufik, S.Ag, M.Si
NIP. 1976051720050110004

Padang, 24 Agustus 2026

Pembimbing II


Abdul Hafizh, S.HI, M.A
NIP. 19871006201903001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 03 September 2026


E087DAOX135008553 **Nur Azizah**
2213030128

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 2213030128
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "ANALISIS PERUBAHAN KEWENANGAN BAWASLU
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 03 September 2026



Nur Azizah
2213030128

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)"** yang ditulis oleh Nur Azizah, Nim. 2213030128, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 5 September 2026

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji I

Leo Dwi Cahyono, S.H.I., M.H
NIP. 198611162019031009
Penguji II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si
NIP. 1976051720050110004
Pembimbing I

Abdul Hafizh, S.H.I., M.A
NIP. 19871006201903001
Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alifadli, M.Ag
NIP. 197212131908031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji dan syukur selalu disampaikan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Nikmat yang sehat, sakit, ilmu, pikiran, waktu, dan hidup yang tak terukur telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)". Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke era yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat agar bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Strata Satu (S.1) di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Pada saat membuatnya, penulis sering menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Namun berkat adanya semangat, dorongan, niat, dan ketekunan yang kuat, serta bantuan moral dan materil dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan penulis tentunya tidak sendiri, di sini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada dua tokoh yang sangat penting dalam kehidupan penulis, yaitu kedua orang tua tercinta. Untuk Ayahanda Samsuddin dan Ibunda Miskah, terima kasih atas setiap tetes keringat dan usaha keras yang selalu kalian berikan untuk anak-anaknya, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa dan dukungan yang selalu menyertai setiap perjalanan, serta pengorbanan yang sangat besar demi masa depan penulis, serta kepada kedua saudara kandung penulis Abdul Ali Askhan dan Abdul Rahman Nuari yang telah memberikan banyak dukungan semangat, perhatian, dan motivasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari perhatian dan bimbingan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rendah hati dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Padang, Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M. Pd., beserta Wakil Rektor I bidang akademik dan kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M. Si., Ph. D. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Lukman Hakim, M. Ag., dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M. Hum., Ph. D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Alfadli, M. Ag., Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M. Ag. Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., M. H. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M. Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., dan Sekretaris Prodi bapak Dr. Eskarni Ushalli Lc., M.A., Serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Taufik S. Ag., M. Si., dan Bapak Abdul Hafizh, S. HI., M. A., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis sejak awal skripsi ini ditulis, yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermamfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

6. Karyawan-karyawati Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
7. Teman kos sekaligus saudara tidak sedarah Resi, Dila Fatriani, Meli Afrilni dan Nisa Ramadani yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan penuh agar penulis bisa meraih gelar sarjana ini serta menjadi tempat pulang di perantauan ini.
8. Teman satu Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal Padang yang telah memberikan wadah untuk tumbuh dan berkembang selama masa perkuliahan penulis di perantauan ini.

Semoga semua kebaikan yang sudah diberikan mendapat balasan yang lebih baik disisi Allah SWT., atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Padang, 24 Agustus 2026



Nur Azizah

NIM. 2213030128

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Nur Azizah, Nim 2213030128**, Dengan Judul **Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025)**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dualisme hukum dalam penanganan Pelanggaran Administrasi pada saat Pemilu dan Pilkada antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Daerah. Saat Pemilu Bawaslu berwenang untuk mengeluarkan putusan kepada KPU dalam penanganan pelanggaran Administrasi sedangkan saat Pilkada Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan surat Rekomendasi Bawaslu kepada KPU yang sifatnya tidak final dan mengikat kerap mendapatkan penolakan dan pengabaian oleh KPU karena masih diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menguji dan memutus kembali Rekomendasi Bawaslu. Inilah yang memicu putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 memerintahkan untuk penyamaan sistem penanganan pelanggaran Administrasi antara rezim Pemilu dan Rezim Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perubahan kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pilkada, dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum MK dalam mengubah kewenangan Bawaslu dari sifatnya “rekomendasi” menjadi “putusan”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan, dan Pendekatan Kasus. Data yang diperoleh dari dokumen resmi (Putusan MK, UU No. 1 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, PKPU, PerBawaslu), studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan data diperkuat oleh adanya wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perubahan kewenangan Bawaslu terjadi karena kebutuhan untuk menyelaraskan sistem hukum Pemilu dan Pilkada. Hal ini juga bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan ketidakselarasan antar lembaga penyelenggara pemilu, yang terjadi karena KPU mengabaikan rekomendasi yang diberikan. Dengan mempertimbangkan hukumnya menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis/sosiologis, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa mekanisme “rekomendasi” tidak lagi cukup untuk memastikan keadilan hukum dan prinsip pemilu yang benar dan jujur. Dengan status rekomendasi diubah menjadi “putusan” yang berwenang untuk memutus dan mengikat secara Administrasi, Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 berhasil menjadikan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial yang lengkap dan utuh serta mempertegas posisi KPU sebagai Pelaksana atau eksekutor dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu, Pelanggaran Administrasi, Pilkada, Putusan MK.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Signifikansi Penelitian	10
1.6 Studi Literatur	11
1.7 Landasan Teori	20
1.8 Metode Penelitian	23
BAB II LANDASAN TEORI	27
2.1 Tujuan Hukum	27
2.1.1 Keadilan	28
2.1.2 Kepastian	29
2.1.3 Kemanfaatan	29
2.2 Teori Kewenangan	31
2.2.1 Kewenangan KPU	33
2.2.2 Kewenangan Bawaslu	38
2.2.3 Kewenangan DKPP	43
2.3 Pertimbangan Hakim	45
2.3.1 Penalaran Hukum	46
2.3.2 Implikasi Amar Putusan MK	50
BAB III KEDUDUKAN SURAT REKOMENDASI BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA	52
3.1 Pengertian Surat Rekomendasi Bawaslu	52
3.2 Surat Rekomendasi Bawaslu sebagai Instrumen Pengawasan Pilkada	54
3.3 Kewenangan Bawaslu dalam Mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu	60
3.4 Muatan Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025	66
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74

4.1 Analisis Latar Belakang Terjadinya Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada	74
4.2 Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Terjadinya Perubahan Dari Sifatnya Rekomendasi Menjadi Putusan	80
4.3 Analisis Implikasi Putuan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 terhadap Posisi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada Dikaitkan Dengan Siyasah Dusturiah	93
BAB V KESIMPULAN	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Surat Sempro	
Lampiran 2. SK Pembimbing	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sengketa Rekomendasi Bawaslu

Tabel 1.2 Kebaruan Penelitian dari yang sebelumnya

Tabel 1.3 Perbedaan sebelum dan setelah putusan MK Nomor 104/PUU-
XXIII/2025

Tabel 1.4 Bentuk Penanganan Administrasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah